

Judul : Turunkan potongan aplikasi, BAM DPR dukung tuntutan abang ojol
Tanggal : Minggu, 14 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Turunkan Potongan Aplikasi BAM DPR Dukung Tuntutan Abang Ojol



Ahmad Heryawan

KETUA Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Ahmad Heryawan mendukung tuntutan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) agar potongan biaya layanan aplikasi ojek online diturunkan dari 15 persen menjadi 10 persen. Selain dibebani layanan administrasi itu, para pengemudi masih dikenakan potongan lain-lain.

Heryawan bilang, total potongan yang harus ditanggung pengemudi diperkirakan mencapai 20 persen dari pendapatan mereka. "Potongan sekarang sekitar 15 persen, ditambah jaminan sosial 5 persen dari pendapatan. Total mencapai 20 persen dan itu tentu memberatkan," kata dia di Jakarta, kemarin.

Heryawan menegaskan, penurunan potongan tidak akan mengurangi keuntungan perusahaan aplikasi transportasi daring. Volume transaksi harian yang sangat besar tetap menjamin keberlangsungan bisnis aplikasi. "Aplikator tetap untung, tapi kesejahteraan pengemudi juga harus diperhatikan. Jangan sampai keuntungan perusahaan dibangun di atas penderitaan mitra pengemudi," ujarnya.

Selain soal potongan, Aliansi

Pengemudi juga menyoroti kebijakan paket hemat yang dinilai merugikan pengemudi. Algoritma aplikasi dianggap lebih menguntungkan pengguna yang membayar biaya prioritas, sementara pengemudi kesulitan mendapat pesanan jika tidak ikut dalam program itu.

APOB turut mendesak agar tata kelola kemitraan tidak hanya dipusatkan di Jakarta. Menurut mereka, sebagian kewenangan perlu dilimpahkan ke daerah agar aspirasi lebih cepat ditangani. Menanggapi hal itu, Heryawan menyebut BAM akan mengundang aplikasi, kementerian terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk merumuskan solusi bersama.

"Kami berharap forum ini bisa melahirkan keputusan cepat karena BAM menerima aspirasi langsung dari pengemudi. Mekanisme seperti ini lebih efektif dibanding jalur biasa yang memakan waktu," jelas Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 itu.

Ia menambahkan, BAM DPR juga tengah berupaya memperkuat kewenangan agar rapat dengar pendapat dapat menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat. "Dengan demikian, hasilnya tidak hanya sebatas rekomendasi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR Adian Napitupulu menyoroti adanya kewajiban berlapis yang harus dipenuhi pengemudi. Para pengemudi ojol kini membayar asuransi ganda meski penghasilan mereka terbatas.

"Ada kewajiban membayar asuransi saat membuat SIM dan STNK, di luar potongan 15 persen ditambah iuran jaminan sosial 5 persen. Bahkan ada struk perjalanan yang menunjukkan biaya tambahan berupa asuransi lain. Jadi mereka bisa membayar hingga empat asuransi sekaligus, padahal manfaat perlindungan tetap terbatas," ungkap Adian. ■ PYB